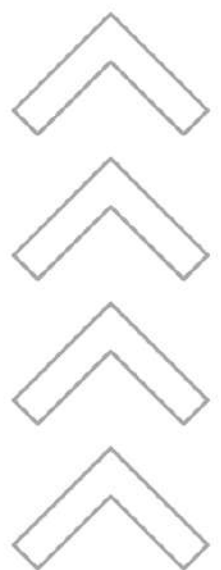


# RENJA MURNI

2023

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung visi dan misi Badan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 diharapkan menjadi bahan aparatur BKAD Kabupaten Purwakarta dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 ini tentunya tidak luput dari kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan dengan harapan implementasi perencanaan kerja dapat mencapai target pembangunan yang optimal.

KEPALA BADAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

R. MUCHAMAD NURCAHJA, ST., MM  
NIP. 19731102 199901 1 001



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	1
BAB I .....	2
PENDAHULUAN .....	2
1.1. Latar Belakang .....	2
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	6
1.4. Sistematika Penulisan .....	7
BAB II .....	8
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	21
2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	22
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	43
BAB III .....	44
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	44
3.1. Telaahan Terhadap kebijakan Nasional .....	44
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	47
3.3. Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) .....	52
BAB IV .....	59
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ....	59
BAB V .....	71
PENUTUP .....	71



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja BKAD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2023.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan



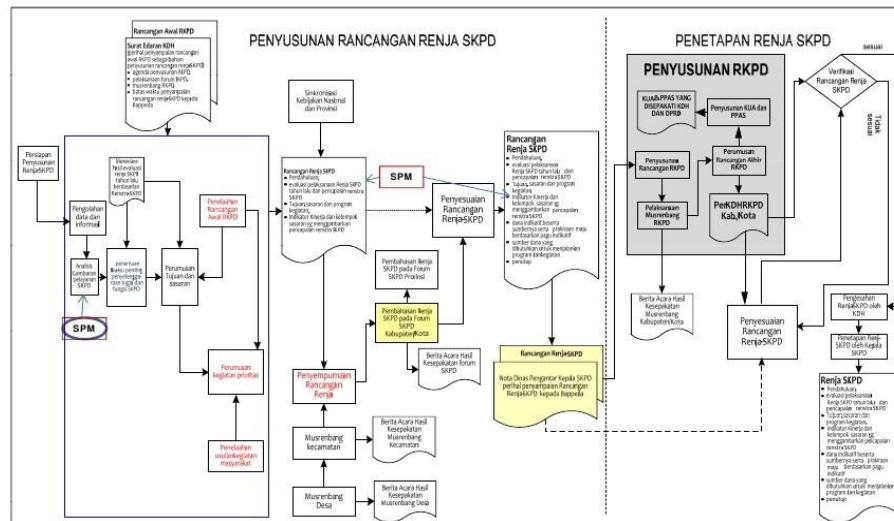
pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) , indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah.



Gambar 1. 1 Bagan Alir Tahapan Penyusunan 1



## 1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023.
  10. **Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 166 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2022;**



## 11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 168 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja perangkat daerah Tahun 2023 adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja perangkat daerah setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja perangkat daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
2. Sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan;
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan antar sektor, wilayah dan fungsi maupun tingkatan pemerintahan;
4. Sebagai instrumen dalam mengukur capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan.





#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- BAB I      PENDAHULUAN
  - 1.1 Latar Belakang
  - 1.2 Landasan Hukum
  - 1.3 Maksud dan Tujuan
  - 1.4 Sistematika Penulisan
  
- BAB II     HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
  - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
  - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
  - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
  - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
  - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
  
- BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
  - 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
  - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
  - 3.3 Program dan Kegiatan
  
- BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
  
- BAB V     PENUTUP



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Untuk mengukur tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan - kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) ini menyajikan evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah tahun lalu dan capaian renstra perangkat daerah sebagai berikut:



Tabel 2. 1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Pencapaian Renstra  
Perangkat Daerah s/d Tahun 2022  
Kabupaten Purwakarta

**Nama Perangkat Daerah : Badan Keuangan dan Aset Daerah**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD (akhir periode renstra PD)	Realisasi Outcome Program dan Output Kegiatan sd Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja			Target Program dan Kegiatan Renja Tahun 2022	Perkiraan Realisasi	
					Target Renja Tahun 2021	Realisasi Renja Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	<b>Urusan Pemerintahan fungsi penunjang</b>									
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>									
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen rencana kerja, Jumlah dokumen rencana strategi SKPD			2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%



	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen rencana kerja anggaran yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran Perubahan Yang Disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun			2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Dokumen yang disusun			12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah bahan/dokumen yang diverifikasi			12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun, Laporan barang milik daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan yang disusun			4 Dokumen	4 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>									



	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>									
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya			-	-	-	88 Stell	88 Stell	100%
	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Peserta yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan formal			3 Orang	3 Orang	100%	3 Orang	3 Orang	100%
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Peraturan yang disosialisasikan			4 Paket	4 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>									
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			8 Jenis	8 Jenis	100%	8 Jenis	8 Jenis	100%
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia			21 Jenis	21 Jenis	100%	21 Jenis	21 Jenis	100%
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah alat tulis dan sarana prasarana kantor yang disediakan,			50 Jenis	50 Jenis	100%	45 Jenis	45 Jenis	100%



		Jumlah makanan dan minuman kantor yang disediakan, Jumlah sarana administrasi keuangan								
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan			15 Jenis	15 Jenis	100%	15 Jenis	15 Jenis	100%
	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah makanan dan minuman rapat dan tamu kantor			2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	2 Jenis	100%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan dalam daerah			432 HOK			432 HOK	432 HOK	
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang di tata			9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	9 Dokumen	100%
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah sarana penunjang SP2D online yang tersedia			1 paket	1 paket	100%	14 Unit	14 Unit	100%
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>									
	Pengadaan mebel	Jumlah pengadaan mebel			33 Unit	33 Unit	100%	30 Unit	30 Unit	100%
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Pengadaan Komponen Printer yang Disediakan Jumlah peralatan dan mesin yang disediakan			19 Unit	19 Unit	100%	19 Unit	19 Unit	100%



	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang disediakan			2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	2 Jenis	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor yang disediakan			2 Jenis Rekening	2 Jenis Rekening	100%	2 Jenis Rekening	2 Jenis Rekening	100%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang disediakan Jumlah jasa pegawai tidak tetap (PTT) yang disediakan Jumlah jasa piket malam yang disediakan Premi asuransi pegawai non PNS			18 Orang	18 Orang	100%	3 orang 2 orang 14 orang 38 orang	3 orang 2 orang 14 orang 38 orang	100%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>									
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara			27 Unit	27 Unit	100%	27 Unit	27 Unit	100%
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan Mesin yang dipelihara Jumlah sarana penunjang perbendaharaan yang dipelihara			9 Jenis	9 jenis	100%	6 Jenis	6 jenis	100%



	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya				1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>									
	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>									
	Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Purwakarta yang Dibukukan			4 Buku	4 Buku	100%	4 Buku 6 Kegiatan	4 Buku 6 Kegiatan	100%
	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS Kabupaten Purwakarta yang Dibukukan			4 Buku	4 Buku	100%	4 Buku	4 Buku	100%
	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Kegiatan Verifikasi dan Validasi Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA-SKPD) anggaran Murni Pelaksanaan Anggaran (DPA) Murni Jumlah Sistem Informasi Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Kegiatan 1 Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	100%





		Anggaran								
	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	Jumlah kegiatan Koordinasi penyusunan verifikasi Perubahan DPA-SKPD Jumlah Sistem Informasi Dokumen Anggaran			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD	Jumlah Buku Penjabaran APBD TA.2021, Raperda APBD TA.2021 Jumlah Dokumen Penelitian RKA APBD Perubahan TA.2021 dan RKA APBD TA.2022 Jumlah Kegiatan Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah Melalui SIMDA Jumlah Perda TA.2020 dan Raperda APBD TA.2021			2 Dokumen 2 Dokumen 12 Kegiatan 6 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen 12 Kegiatan 6 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD	Jumlah Buku Penjabaran Perubahan APBD TA.2020 Jumlah Dokumen Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD TA.2020			2 Dokumen 2 Dokumen 12 Kegiatan 6 Dokumen	2 Dokumen 2 Dokumen 12 Kegiatan 6 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Koordinasi perencanaan anggaran	Jumlah Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



	belanja daerah	dan Penginputan Laporan Realisasi Keuangan APBD se-Kabupaten Purwakarta Jumlah Kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah			12 Kegiatan	12 Kegiatan		12 Kegiatan 1 Dokumen 12 Kegiatan	12 Kegiatan 1 Dokumen 12 Kegiatan	
	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>									
	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Pengendalian Kas Daerah			12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
	Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	Jumlah Kegiatan Verifikasi dan Validasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Anggaran Murni dan Perubahan Jumlah Penyusunan Buku SPD Jumlah Penyusunan SPD Jumlah Penyusunan SPD OPD			2 Kegiatan 24 Buku 12 Kegiatan 46 OPD	2 Kegiatan 24 Buku 12 Kegiatan 46 OPD	100%	46 OPD	46 OPD	100%
	Koordinasi, fasilitasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya	Jumlah Rekonsiliasi Data transfer yang dilaksanakan			12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan	Jumlah Kegiatan Koordinasi yang			1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%



	dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait	dilakukan dengan para Bendahara Gaji								
	Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan	Jumlah SOP Penatausahaan Keuangan			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupate/kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Realisasi SPP, SPM dan SP2D yang dilaksanakan			4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	12 orang 4 Kegiatan	12 orang 4 Kegiatan	100%
	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>									
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Jumlah Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2 Jumlah Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 3 Jumlah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			1 Dokumen Perda 1 Dokumen Perbub 3 Dokumen	1 Dokumen Perda 1 Dokumen Perbub 3 Dokumen	100%	1 Dokumen Perda 1 Dokumen Perbub 3 Dokumen	1 Dokumen Perda 1 Dokumen Perbub 3 Dokumen	100%
	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>									



	Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	Jumlah Desa yang mendapatkan ADD			183 Desa	183 Desa	100%	183 Desa	183 Desa	100%
	Pengelolaan dana darurat dan mendesak	Jumlah pengelolaan Dana Darurat Mendesak			1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
	Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota	Jumlah Desa yang Mendapatkan Penyaluran DBH			183 Desa	183 Desa	100%	183 Desa	183 Desa	100%
	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>									
	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah	Jumlah Sistem yang dipelihara			1 sistem	1 Sistem	100%	1 sistem	1 Sistem	100%
	Pembinaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota	Jumlah OPD yang dibina Jumlah Pengelola SIMDA bidang keuangan daerah pemerintah kab/kota						46 OPD	46 OPD	100%
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>									
	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>									
	Penyusunan Standar Harga	Jumlah dokumen standar harga barang Pemerintah Kab. Purwakarta			65 Buku	65 Buku	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Standar Barang Milik Daerah Jumlah Dokumen Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah			70 Buku	70 Buku	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%



	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Tersusun			2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perda Pengelolaan Barang Milik Daerah Jumlah dokumen sensus Barang Milik Daerah Jumlah TP-TGR			1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen data Pengguna Kendaraan Dinas Operasional (KDO) roda 2 dan Roda 4 milik Pemerintah Kabupaten Purwakarta Jumlah Dokumen hasil Inventarisasi Tanah dan Bangunan Milik PEMDA			1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Bidang Tanah yang Disertifikatkan dan Diteliti Riwayat Dokumennya			40 Bidang Tanah	40 Bidang Tanah	100%	50 Bidang Tanah	50 Bidang Tanah	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Bale Mahasiswa Pemda Purwakarta di kota Bandung yang dipelihara Jumlah Dokumen			1 Unit 10 Buku	1 Unit 10 Buku	100%	1 Unit 10 Buku	1 Unit 10 Buku	100%



		Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah								
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BA Rekonsiliasi Pengadaan Belanja Modal Barang Milik Daerah Kabupaten Purwokarta			4 Dokumen	4 Dokumen	100%	46 OPD	46 OPD	100%
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun			1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Barang Milik Daerah						46 Orang	46 Orang	100%



## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta. Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 - 2023, terdapat 2 (Dua) sasaran strategis badan yang diukur melalui 9 (Sembilan) indikator sasaran.

Tabel 2. 2  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten  
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023

No	Indikator Sasaran	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra	Perkiraan Realisasi Capaian	Rasio Capaian
					2022	2022	2022
1	Capaian SAKIP pemerintah daerah				B		
2	Presentase pemenuhan penunjang pelayanan kantor				90%		
3	Persentase pelayanan verifikasi dokumen administrasi keuangan sesuai dengan SOP pelayanan				100%		
4	Persentase laporan keuangan daerah yang tepat waktu				100%		
5	Persentase pengelola asset OPD yang dibina				100%		
6	Presentase perangkat daerah yang mengikuti rekonsiliasi BMD						
7	Persentase ketepatan waktu penyusunan APBD				100%		
8	Persentase ketepatan waktu penetapan APBD				100%		



9	Persentase penyerapan anggaran				94%		
---	--------------------------------	--	--	--	-----	--	--

### 2.3. Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD :

- 1) Belum tertatanya manajemen asset daerah;
- 2) Pemahaman aparat pengelola keuangan daerah yang belum menyeluruh terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- 3) Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara keseluruhan;
- 4) Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM yang kompeten dibidang teknologi informasi serta diperlukan sarana prasarana untuk mengoptimalkan aplikasi keuangan daerah;
- 5) Masih diperlukan peningkatan kemampuan Pengurus barang dan penyimpan barang dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.

Rekomendasi dan Catatan Strategis

- 1) Penataan manajemen asset daerah;
- 2) Peningkatan pemahaman aparat pengelola keuangan dengan dilaksanakannya bimbingan teknis;
- 3) Fasilitasi dana perimbangan dan koordinasi dengan kementerian Keuangan RI dan BPD Pemegang Kas Daerah;
- 4) Peningkatan Kompetensi SDM melalui pendidikan di bidang penilaian aset dan dengan koordinasi serta pendampingan dengan SKPD dalam membuat neraca untuk mempercepat penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan;





- 5) Menyediakan sarana prasarana dan meningkatkan kompetensi SDM untuk pengembangan keuangan daerah dengan aplikasi keuangan daerah;
- 6) Meningkatkan pemahaman SDM melalui Bimtek dan pendampingan untuk pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset bagi pengguna barang SKPD.

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal RKPD tahun 2023 merupakan acuan bagi penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah termasuk Badan Keuangan dan Aset Daerah. Sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan rancangan RKPD ini, Badan keuangan dan Aset Daerah harus melakukan telaahan terhadap rancangan RKPD apakah sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang telah dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah. Adapun proses telaahan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Badan keuangan dan Aset Daerah yang tercantum di dalam RKPD 2023;
2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya;
3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;
4. Memastikan bahwa program/kegiatan di Badan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023;



5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai;
6. Membuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah hasil review terhadap RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan;
7. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, tidak ada perbedaan program, namun terdapat beberapa kegiatan dan jumlah anggaran yang berbeda antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Badan Keuangan dan Aset Daerah karena hasil telaahan bersama dan efisiensi kegiatan serta jumlah anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023.

Untuk lebih rinci, disajikan dalam Tabel 2.3 Rencana Kerja (Renja) merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan setiap tahunnya.



Tabel 2. 3

Review terhadap RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B				Capaian SAKIP Perangkat Daerah	B		
		Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	90%				Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	90%		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	7 Kegiatan				Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	7 Kegiatan		



Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	30.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	30.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	3 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	3 Dokumen	10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	10.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	15.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	30.000.000	



						a				
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun</b>	<b>96 Dokumen</b>	<b>56.070.044.840</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/Bulan	56.025.662.028	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/Bulan	56.025.662.028	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	9.382.812	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	9.382.812	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	25.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	25.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	12 Laporan	10.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	12 Laporan	10.000.000	



		Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Pelaporan Atas Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>10 Dokumen</b>	<b>30.000.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Pelaporan Atas Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD</b>	<b>10 Dokumen</b>	<b>30.000.000</b>	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	10.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	20.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan	20.000.000	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Pelaporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>450.000.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Pelaporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>450.000.000</b>	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	200.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	200.000.000	



Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Purwakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Purwakarta	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	50.000.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	350 Orang	200.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	350 Orang	200.000.000	
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah paket penyediaan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>25 Paket</b>	<b>1.410.000.000</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah paket penyediaan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>25 Paket</b>	<b>1.410.000.000</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	50.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	75.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	75.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	350.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Purwakarta	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	350.000.000	
Penyediaan Barang	Kab.	Jumlah Paket	10 Paket	350.000.000	Penyediaan Barang	Kab.	Jumlah Paket	10 Paket	350.000.000	



Cetakan dan Penggandaan	Purwakarta	Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			Cetakan dan Penggandaan	Purwakarta	Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Purwakarta 25 Dokumen	10.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	25 Dokumen	10.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	50.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	250.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	75.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	75.000.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	200.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	200.000.000	
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Pengadaan Unit Barang Milik Daerah Penunjang</b>	<b>83 Unit</b>	<b>850.000.000</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Pengadaan Unit Barang Milik Daerah Penunjang</b>	<b>83 Unit</b>	<b>850.000.000</b>	





		<b>Urusan Pemerintah Daerah</b>					<b>Urusan Pemerintah Daerah</b>			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwokarta	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	350.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwokarta	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	350.000.000	
Pengadaan Mebel	Kab. Purwokarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	200.000.000	Pengadaan Mebel	Kab. Purwokarta	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Unit	200.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purwokarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43 Unit	300.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purwokarta	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43 Unit	300.000.000	
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Pelaporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun</b>	<b>36 Dokumen</b>	<b>2.482.262.516</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Pelaporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun</b>	<b>36 Dokumen</b>	<b>2.482.262.516</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwokarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Purwokarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purwokarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	300.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Purwokarta	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	12 Laporan	300.000.000	



Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purwakarta	Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.177.262.516	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Purwakarta	Disediakan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.177.262.516	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara dan Dimanfaatkan dengan Baik</b>	<b>139 Unit</b>	<b>750.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara dan Dimanfaatkan dengan Baik</b>	<b>139 Unit</b>	<b>750.000.000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purwakarta	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Purwakarta	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit	100.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	100.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Purwakarta	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	100.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purwakarta	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin	100 Unit	100.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Purwakarta	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin	100 Unit	100.000.000	



		Lainnya Yang Dipelihara					Lainnya Yang Dipelihara			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	350.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	350.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	100.000.000	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>				<b>368.746.091.106</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>				<b>368.746.091.106</b>	
		Persentase pelayanan verifikasi dokumen administrasi keuangan sesuai dengan SOP pelayanan								
		Persentase laporan keuangan daerah yang tepat waktu								
		Persentase ketepatan waktu penyusunan APBD								
		Persentase								



		ketepatan waktu penetapan APBD								
		Persentase Penyerapan Anggaran								
<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>32 Dokumen</b>	<b>3.220.000.000</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>		<b>Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>32 Dokumen</b>	<b>3.220.000.000</b>	
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Purwokarta	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kab. Purwokarta	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	200.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Purwokarta	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	200.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kab. Purwokarta	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	4 Dokumen	200.000.000	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Purwokarta	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	385.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Kab. Purwokarta	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	385.000.000	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Purwokarta	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	200.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Kab. Purwokarta	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen	200.000.000	
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Purwokarta	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	145.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Kab. Purwokarta	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	2 Dokumen	145.000.000	
Koordinasi, Penyusunan dan	Kab.	Jumlah Perubahan DPA-	1 Dokumen	100.000.000	Koordinasi, Penyusunan dan	Kab.	Jumlah Perubahan DPA-	1 Dokumen	100.000.000	



Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Purwakarta	SKPD yang Diverifikasi			Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Purwakarta	SKPD yang Diverifikasi			
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Purwakarta	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	750.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab. Purwakarta	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	750.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Purwakarta	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	7 Dokumen	720.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab. Purwakarta	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	7 Dokumen	720.000.000	
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	520.000.000	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen	520.000.000	
<b>Koordinasi dan Pengelolaan</b>		<b>Jumlah Dokumen Pelaporan</b>	<b>36 Dokumen</b>	<b>890.000.000</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan</b>		<b>Jumlah Dokumen Pelaporan</b>	<b>36 Dokumen</b>	<b>890.000.000</b>	



Perbendaharaan Daerah		Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			Perbendaharaan Daerah		Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	175.000.000	Koordinasi dan Pengelolaan Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	175.000.000	
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3 Dokumen	100.000.000	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	3 Dokumen	100.000.000	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	165.000.000	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen	165.000.000	



Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	4 Dokumen	125.000.000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	4 Dokumen	125.000.000	
Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Purwakarta	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Kab. Purwakarta	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen	150.000.000	
Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	175.000.000	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	175.000.000	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Atas Pelaksanaan Kegiatan Akuntansi dan Keuangan	47 Dokumen	775.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Atas Pelaksanaan Kegiatan Akuntansi dan Keuangan	47 Dokumen	775.000.000	



		Daerah Dokumen Dokumen					Daerah Dokumen Dokumen			
Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5 Laporan	150.000.000	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	5 Laporan	150.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	3 Dokumen	525.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	3 Dokumen	525.000.000	
Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	100.000.00	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	100.000.00	





Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Disusun	51 Dokumen	363.421.091.106	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Disusun	51 Dokumen	363.421.091.106	
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Purwokarta	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	204 Laporan	294.638.898.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab. Purwokarta	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	204 Laporan	294.638.898.000	
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Purwokarta	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	23.820.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab. Purwokarta	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan	23.820.000.000	
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Purwokarta	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	204 Laporan	44.962.193.106	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab. Purwokarta	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	204 Laporan	44.962.193.106	
Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Jumlah Pembinaan sistem Informasi Pemerintah daerah Bidang Keuangan Daerah Kab/Kota	2 Paket	440.000.000	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah		Jumlah Pembinaan sistem Informasi Pemerintah daerah Bidang Keuangan Daerah Kab/Kota	2 Paket	440.000.000	



Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	300.000.000	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen	300.000.000	
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	115 Orang	140.000.000	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	115 Orang	140.000.000	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>				<b>2.200.000.000</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>				<b>2.200.000.000</b>	
		Persentase perangkat daerah yang melakukan rekonsiliasi laporan BMD	100%				Persentase perangkat daerah yang melakukan rekonsiliasi laporan BMD	100%		
		Persentase pengelola aset OPD yang dibina	100%				Persentase pengelola aset OPD yang dibina	100%		
Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah	14 Dokumen	2.200.000.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah	14 Dokumen	2.200.000.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah



Penyusunan Standar Harga	Kab. Purwakarta	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	240.000.000	Penyusunan Standar Harga	Kab. Purwakarta	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen	240.000.000	
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	150.000.000 K	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	150.000.000 K	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	50.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	50.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	100.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	100.000.000	
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	185.000.000	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	185.000.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	200 Laporan	600.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	200 Laporan	600.000.000	
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan,	4 Dokumen	300.000.000	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang	Kab. Purwakarta	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan,	4 Dokumen	300.000.000	



Milik Daerah		dan Penghapusan Barang Milik Daerah			Milik Daerah		dan Penghapusan Barang Milik Daerah			
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	100.000.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	4 Laporan	100.000.000	
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	325.000.000	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab. Purwakarta	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan	325.000.000	
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	150.000.000	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Purwakarta	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	100 Orang	150.000.000	



## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Namun tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat secara langsung terhadap Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah. Akan tetapi selaku PPKD, BKAD menganggarkan usulan masyarakat berupa bantuan sosial dan hibah yang diusulkan oleh dinas – dinas terkait.



## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Telaahan Terhadap kebijakan Nasional

Tabel 3. 1

Identifikasi Kebijakan Nasional Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Purwokarta

No	Kebijakan Nasional	Sumber	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Memperkuat kualitas belanja negara untuk mencapai sasaran prioritas nasional dan sasaran pembangunan lainnya;	Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021	-
2.	Memperlebar ruang fiskal dengan prinsip keberlangsungan fiskal melalui mobilisasi sumber-sumber pendapatan Negara yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan SDA, pengelolaan asset Negara, serta pengelolaan layanan publik;		
3.	Memastikan pembiayaan yang efisien dan inovatif ( <i>Innovative financing</i> ) untuk menjaga deficit dan rasio utang agar berkelanjutan.		

Dalam upaya mencapai sasaran keuangan Negara pada tahun 2022, kebijakan fiskal diarahkan untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan yang ditempuh adalah: (1) Memperkuat kualitas belanja Negara untuk mencapai sasaran prioritas nasional dan sasaran pembangunan lainnya dalam Rencana Kerja Pemerintah, (2) Memperlebar ruang fiskal dengan prinsip keberlangsungan fiskal melalui mobilisasi sumber-sumber pendapatan Negara yang terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan SDA, pengelolaan asset Negara, serta pengelolaan pelayanan public, (3) Memastikan pembiayaan yang efisien dan inovatif (*innovative inancing*) untuk menjaga deficit dan rasio utang agar berkelanjutan.



Kebijakan tersebut diimplementasikan melalui strategi meliputi:

1. Memperkuat kualitas belanja dengan : (1) Peningkatan efektivitas belanja penguatan daya saing Sumber Daya Manusia; (2) Peningkatan efektivitas program perlindungan sosial agar lebih komprehensif dan selaras dengan profil demografi; (3) Pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kapasitas produksi, daya saing, dan mendukung transformasi industrialisasi (energy, pangan dan air, serta konektivitas); (4) Peningkatan porsi transfer ke daerah hingga lebih besar dari belanja K/L yang disertai dengan akuntabilitas dan efektivitas pemanfaatan dana dengan prinsip transfer berbasis *output*; (5) Pembentukan skema pembiayaan risiko bencana yang lebih terencana dan berkelanjutan; serta (6) Peningkatan efektivitas belanja pada pangarusutamaan yaitu kesetaraan gender, tata kelola, kerentanan belanja dan perubahan iklim, modal sosial budaya dan transformasi digital.
2. Memperlebar ruang fiskal dengan : (1) Perluasan basis pajak baru serta perbaikan administrasi perpajakan; (2) Penajaman insentif perpajakan (*tax holiday & tak allowance*) untuk mendorong kegiatan ekonomi strategis; (3) Simplikasi struktur pajak/retribusi daerah untuk meningkatkan daya saing; (4) Simplikasi tarif dan ekstensifikasi barang kena cukai; (5) Peningkatan PNBPN terutama yang bersumber dari SDA non-migas; serta (6) Perluasan sumber penerimaan baru daerah melalui pelimpahan jenis pajak yang menjadi kewenangan daerah.
3. Memastikan pembiayaan yang efisien dan inovatif (*innovative financing*) dengan : (1) Pengendalian komposisi utang dalam negeri dan luar negeri dalam batas aman dan terkendali; (2) Pemanfaatan pinjaman luar negeri bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; (3) Percepatan pendalaman keuangan dan keuangan



inklusif; serta (4) Peningkatan akses bagi peningkatan peran swasta, BUMN dan BLU.

Guna mewujudkan sasaran dan arah kebijakan fiskal di atas, dilaksanakan 12 (dua belas) program pembangunan pada Kementerian Keuangan selaku otoritas fiskal. Dari 12 (dua belas) program pembangunan tersebut, terdapat 9 (sembilan) program yang langsung terkait dengan pencapaian sasaran Keuangan Negara yaitu:

1. Program Pengelolaan Anggaran Negara;
2. Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara;
4. Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang;
5. Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan;
6. Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak;
7. Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
8. Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
9. Program Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor melalui Portal INSW.

Selanjutnya, terdapat 3 (tiga) program lainnya yang merupakan program pendukung dalam pencapaian sasaran Keuangan Negara, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Departemen Keuangan;
2. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Keuangan;
3. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan.





### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi Badan Keuangan dan Aset Daerah. Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Adapun tujuan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan adalah :

1. Mewujudkan manajemen perkantoran secara optimal;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang ingin dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah yang telah ditetapkan adalah :

1. Meningkatnya pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.

Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan dalam implementasi program/kegiatan yang disertai dengan rencana tingkat capaian (target masing-masing indikator dari program/kegiatan).



Sasaran yang ditempuh untuk mencapai tujuan disajikan dalam tabel 3.2 berikut ini



Tabel 3. 2  
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja BKAD  
Kabupaten Purwakarta  
Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan manajemen perkantoran secara optimal	Tingkat pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Meningkatnya pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	-	-	B	B	B
				Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran	-	-	90	90	90
2	Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pelaporan APBD	Tingkat opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Persentase pelayanan verifikasi dokumen administrasi keuangan sesuai dengan SOP pelayanan	100	100	100	100	100
				Persentase laporan	100	100	100	100	100



				keuangan daerah yang tepat waktu					
				Presentase Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tersedia	-	78,57	-	-	-
				Presentase Inventarisasi asset daerah	60,24	61	-	-	-
				Persentase perangkat daerah yang melakukan rekonsiliasi laporan BMD	-	-	100	100	100
				Persentase pengelola asset OPD yang dibina	100	100	100	100	100
				Persentase penyusunan APBD ketepatan waktu	100	100	100	100	100
				Persentase ketepatan waktu	100	100	100	100	100



				penetapan APBD					
				Persentase Penyerapan Anggaran	91	92	93	94	95



### **3.3. Program dan Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)**

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di BKAD Kabupaten Purwakarta Pada Tahun 2022 terdiri atas :

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Program ini memiliki Indikator : Capaian SAKIP Perangkat Daerah, dan Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran dengan kegiatan dan Sub Kegiatan :

- ❖ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
  - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
  - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - e) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- ❖ Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;



- c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
- d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- ❖ Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
  - b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- ❖ Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
  - b) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;
  - c) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.
- ❖ Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - f) Fasilitas Kunjungan Tamu;
  - g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;



- h) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
- i) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- ❖ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - b) Pengadaan Mebel;
  - c) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- ❖ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- ❖ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
  - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - e) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## **2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**





Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program ini memiliki Indikator : Persentase pelayanan verifikasi dokumen administrasi keuangan sesuai dengan SOP pelayanan, Persentase laporan keuangan daerah yang tepat waktu , Persentase penyusunan APBD ketepatan waktu , Persentase ketepatan waktu penetapan APBD , dan Persentase Penyerapan Anggaran dengan kegiatan dan Sub Kegiatan :

- ❖ Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS;
  - b) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
  - c) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
  - d) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
  - e) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
  - f) Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
  - g) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
  - h) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;
  - i) Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah.
- ❖ Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, dengan sub kegiatan :



- a) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
  - b) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;
  - c) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
  - d) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan Atas SP2D dengan Instansi Terkait;
  - e) Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan;
  - f) Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- ❖ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan :
- a) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  - b) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
  - c) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- ❖ Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan :



- a) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
  - b) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
  - c) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.
- ❖ Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan :
- a) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah;
  - b) Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

### **3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, Program ini memiliki Indikator Persentase perangkat daerah yang melakukan rekonsiliasi laporan BMD dan Persentase pengelola asset OPD yang dibina dengan kegiatan dan Sub Kegiatan :

- ❖ Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - a) Penyusunan Standar Harga;
  - b) Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
  - c) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
  - d) Penatausahaan Barang Milik Daerah;
  - e) Inventarisasi Barang Milik Daerah;
  - f) Pengamanan Barang Milik Daerah;
  - g) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;



- h) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
- i) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
- j) Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.



## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, maka Rencana Kerja Tahunan Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Tabel 4. 1  
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023  
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan							
5.02	Keuangan				433,083,398,462			476.322.238.316
5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				62,307,596,856			68.326.538.099
		Capaian SAKIP Perangkat Daerah		B			B	
		Persentase pemenuhan penunjang pelayanan perkantoran		90%			90%	
5.02.01.2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		7 Kegiatan	94,681,800		7 Kegiatan	101.250.000
5.02.01.2,01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Purwakarta kab	5 Dokumen	29,983,900		5 Dokumen	31.500.000
5.02.01.2,01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKASKPD	Purwakarta kab	3 Dokumen	9,825,700		3 Dokumen	10.500.000



5.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Purwakarta kab	2 Dokumen	9,884,000		2 Dokumen	10.500.000
5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Purwakarta kab	4 Laporan	14,994,000		4 Laporan	15.750.000
5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Purwakarta kab	6 Laporan	29,994,200		6 Laporan	33.000.000
<b>5.02.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Yang Disusun</b>		<b>96 Dokumen</b>	<b>56,071,670,328</b>		<b>96 Dokumen</b>	<b>61.675.799.331</b>
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Purwakarta kab	55 Orang/ Bulan	56,025,662,028		55 Orang/ Bulan	61.628.228.231
5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Purwakarta kab	12 Dokumen	16,079,600		12 Dokumen	10.321.100
5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Purwakarta kab	5 Laporan	19,944,300		5 Laporan	26.250.000
5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Purwakarta kab	12 Laporan	9,984,400		12 Laporan	11.000.000
5.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Atas Kebutuhan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		10 Dokumen	26,538,500		10 Dokumen	32.500.000



5.02.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Purwakarta kab	4 Dokumen	9,995,100		4 Dokumen	10.500.000
5.02.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Purwakarta kab	6 Laporan	16,543,400		6 Laporan	22.000.000
<b>5.02.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Disusun</b>		<b>3 Dokumen</b>	<b>506,492,000</b>		<b>3 Dokumen</b>	<b>492.500.000</b>
5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Purwakarta kab	2 Paket	256,167,000		2 Paket	220.000.000
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Purwakarta kab	2 Orang	50,325,000		2 Orang	52.500.000
5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Purwakarta kab	350 Orang	200,000,000		350 Orang	220.000.000
<b>5.02.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah paket penyediaan administrasi umum perangkat daerah</b>		<b>25 Paket</b>	<b>1,525,136,238</b>		<b>25 Paket</b>	<b>1.534.250.000</b>
5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Purwakarta kab	2 Paket	49,985,400		2 Paket	52.500.000
5.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Purwakarta kab	3 Paket	74,992,300		3 Paket	78.750.000
5.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Purwakarta kab	5 Paket	360,397,638		5 Paket	385.000.000
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang dan Cetak	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Purwakarta kab	10 Paket	395,419,500		10 Paket	385.000.000





	Pengandaan							
5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kab. Purwakarta	25 Dokumen	14,400,000		25 Dokumen	10.500.000
5.02.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Purwakarta kab	12 Laporan	50,000,000		12 Laporan	55.000.000
5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Purwakarta kab	12 Laporan	255,000,000		12 Laporan	275.000.000
5.02.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Purwakarta kab	2 Dokumen	74,941,400		2 Dokumen	82.500.000
5.02.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Purwakarta kab	12 Dokumen	250,000,000		12 Dokumen	210.000.000
<b>5.02.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>83 Unit</b>	<b>820,247,750</b>		<b>83 Unit</b>	<b>935.000.000</b>
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Purwakarta kab	1 Unit	320,620,000		1 Unit	385.000.000
5.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Purwakarta kab	40 Unit	199,494,900		40 Unit	220.000.000
5.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Purwakarta kab	43 Unit	300,132,850		43 Unit	330.000.000
<b>5.02.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disusun</b>		<b>36 Dokumen</b>	<b>2,482,138,240</b>		<b>36 Dokumen</b>	<b>2.730.238.768</b>
5.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Purwakarta	12 Laporan	5,000,000		12 Laporan	5.250.000



			kab					
5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Purwakarta kab	12 Laporan	299,400,000		12 Laporan	330.000.000
5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Purwakarta kab	12 Laporan	2,177,738,240		12 Laporan	2.394.988.768
<b>5.02.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara dan Dimanfaatkan dengan Baik</b>		<b>139 Unit</b>	<b>780,692,000</b>		<b>139 Unit</b>	<b>825.000.000</b>
5.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Purwakarta kab	8 Unit	86,000,000		8 Unit	110.000.000
5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Purwakarta kab	27 Unit	143,000,000		27 Unit	110.000.000
5.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	Purwakarta kab	100 Unit	100,000,000		100 Unit	110.000.000
5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Yang Dipelihara/Direhabilitasi	Purwakarta kab	1 Unit	351,692,000		1 Unit	385.000.000
5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Purwakarta kab	2 Unit	100,000,000		2 Unit	110.000.000



	Kantor atau Bangunan Lainnya							
<b>5.02.02</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>				<b>368,475,853,006</b>			<b>405.598.200.217</b>
		Persentase pelayanan verifikasi dokumen administrasi keuangan sesuai dengan SOP pelayanan		100%			100%	
		Persentase laporan keuangan daerah yang tepat waktu		100%			100%	
		Persentase ketepatan waktu penyusunan APBD		100%			100%	
		Persentase ketepatan waktu penetapan APBD		100%			100%	
		Persentase Penyerapan Anggaran		95%			95%	
<b>5.02.02.2.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>		<b>32 Dokumen</b>	<b>3,156,739,500</b>		<b>32 Dokumen</b>	<b>3.532.000.000</b>
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Purwokarta kab	4 Dokumen	200,251,500		4 Dokumen	210.000.000
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Purwokarta kab	4 Dokumen	199,998,600		4 Dokumen	220.000.000
5.02.02.2.01	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Purwokarta kab	2 Dokumen	520,890,100		2 Dokumen	423.500.000
5.02.02.2.01	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Purwokarta kab	1 Dokumen	492,291,000		1 Dokumen	220.000.000



5.02.02.2.01	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Purwakarta kab	2 Dokumen	67,998,400		2 Dokumen	159.500.000
5.02.02.2.01	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Purwakarta kab	1 Dokumen	35,466,000		1 Dokumen	110.000.000
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Purwakarta kab	10 Dokumen	738,480,000		10 Dokumen	825.000.000
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Purwakarta kab	7 Dokumen	708,479,900		7 Dokumen	792.000.000
5.02.02.2.01	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Purwakarta kab	1 Dokumen	192,884,000		1 Dokumen	572.000.000
<b>5.02.02.2.02</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaporan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		<b>36 Dokumen</b>	<b>837,937,700</b>		<b>36 Dokumen</b>	<b>966.500.000</b>
5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Purwakarta kab	12 Dokumen	127,560,300		12 Dokumen	192.500.000
5.02.02.2.02.03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Purwakarta kab	3 Dokumen	95,740,400		3 Dokumen	105.000.000



	Penerbitan Anggaran Kas dan SPD							
5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Purwakarta kab	12 Dokumen	164,721,900		12 Dokumen	181.500.000
5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Purwakarta kab	4 Dokumen	124,946,400		4 Dokumen	137.500.000
5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Purwakarta kab	1 Dokumen	149,971,900		1 Dokumen	157.500.000
5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Purwakarta kab	100 Orang	174,996,800		100 Orang	192.500.000
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan dan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Atas Pelaksanaan Kegiatan Akuntansi dan Keuangan Daerah Dokumen Dokumen		47 Dokumen	698,234,200		47 Dokumen	852.500.000



*Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022*  
*Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)*

5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Purwakarta kab	5 Laporan	66,040,100		5 Laporan	165.000.000
5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Purwakarta kab	3 Dokumen	586,494,100		3 Dokumen	577.500.000
5.02.02.2.03.09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Purwakarta kab	2 Dokumen	45,700,000		2 Dokumen	110.000.000
<b>5.02.02.2.04</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaporan Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Disusun</b>		<b>51 Dokumen</b>	<b>363,400,491,106</b>		<b>51 Dokumen</b>	<b>399.763.200.217</b>
5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Purwakarta kab	204 Laporan	294,618,298,000		204 Laporan	324.102.787.800
5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Purwakarta kab	12 Laporan	23,820,000,000		12 Laporan	26.202.000.000



*Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022*  
*Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)*

5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Purwakarta kab	204 Laporan	44,962,193,106		204 Laporan	49.458.412.417
5.02.02.2.05	<b>Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>	<b>Jumlah Pembinaan sistem Informasi Pemerintah daerah Bidang Keuangan Daerah Kab/Kota</b>		<b>2 Paket</b>	<b>382,450,500</b>		<b>2 Paket</b>	<b>484.000.000</b>
5.02.02.2.05.02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Purwakarta kab	1 Dokumen	192,899,900		1 Dokumen	330.000.000
5.02.02.2.05.03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Purwakarta kab	115 Orang	189,550,600		115 Orang	154.000.000
5.02.03	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>				<b>2,299,948,600</b>			<b>2.397.500.000</b>
		Persentase perangkat daerah yang melakukan rekonsiliasi laporan BMD		100%			100%	
		Persentase pengelola asset OPD yang dibina		100%			100%	
5.02.03.2.01	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaporan Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>14 Dokumen</b>	<b>2,299,948,600</b>		<b>14 Dokumen</b>	<b>2.397.500.000</b>
5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Purwakarta kab	1 Dokumen	215,994,600		1 Dokumen	264.000.000
5.02.03.2.01.02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Purwakarta kab	1 Dokumen	149,986,500		1 Dokumen	157.500.000



	Kebutuhan Barang Milik Daerah							
5.02.03.2,01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Purwakarta kab	2 Dokumen	49,966,900		2 Dokumen	55.000.000
5.02.03.2,01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Purwakarta kab	1 Laporan	238,729,500		1 Laporan	110.000.000
5.02.03.2,01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Purwakarta kab	1 Laporan	231,454,000		1 Laporan	203.500.000
5.02.03.2,01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Purwakarta kab	200 Laporan	699,993,800		200 Laporan	660.000.000
5.02.03.2,01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Purwakarta kab	4 Dokumen	299,840,400		4 Dokumen	315.000.000
5.02.03.2,01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Purwakarta kab	4 Laporan	75,993,000		4 Laporan	110.000.000
5.02.03.2,01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Purwakarta kab	2 Laporan	188,000,000		2 Laporan	357.500.000
5.02.03.2,01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Purwakarta kab	100 Orang	149,989,900		100 Orang	165.000.000





## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2023, merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan demikian Rencana Kerja (Renja) BKAD ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Purwakarta yang merupakan adopsi langsung dari komitmen Pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode Tahun 2018 - 2023 melalui penetapan Visi: "*Mewujudkan Purwakarta Istimewa*" yang menjadi semangat nyata dengan semangat 5 Sila dari Pancasila.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan organisasi, keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja ini akan sangat ditentukan oleh komitmen dan dukungan semua pihak yang ada dalam Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta. Oleh karena itu dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan seluruh jajaran aparatur Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Purwakarta dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2023.